

KERENTANAN INFRASTRUKTUR DAN MATA PENCAHARIAN PEREMPUAN AKIT

Mita Rosaliza¹, Hesti Asriwandari², Achmad Hidir³

¹Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia, mita.rosaliza@ui.ac.id

²Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Riau, hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id

³Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Riau, achmad.hidir@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang masalah kerentanan di wilayah pesisir pulau Bengkalis, seperti masyarakat rentan terhadap bahaya iklim kronis seperti abrasi, banjir, gelombang badai, anomali curah hujan, salinitas, dan juga masalah sosio-ekonomi dengan pendekatan *The Sustainable Livelihood Framework*. Perempuan Akit yang mewakili masyarakat yang rentan di wilayah pesisir. Yang mengalami dampak perubahan iklim, ditandai dengan langkanya infrastruktur yang tanggap terhadap gender dan mata pencaharian yang terintegrasi untuk perempuan beradaptasi. Temuan diperoleh kerentanan mata pencaharian perempuan pesisir pedesaan disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan kelembagaan sosial ekonomi yang memadai. Terdapat kebutuhan akan ruang-fisik komunitas yang responsif gender untuk menciptakan peluang diversifikasi mata pencaharian terlepas dari tingkat ketergantungan perempuan terhadap hutan mangrove, pengembangan keterampilan dan kemungkinan berbagi jaringan diperlukan untuk mengurai permasalahan perempuan pesisir ini. Data kualitatif yang dikumpulkan melalui FGD, wawancara mendalam terhadap perempuan rentan di lokasi penelitian yaitu desa Berancah, desa pesisir yang rentan bencana di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Fieldwork dijalankan dalam rentang waktu Juli 2022 hingga Februari 2023.

Kata Kunci: Kerentanan kawasan pesisir; Infrastruktur tangguh; Responsivitas gender

1. PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir, khususnya pulau terbelakang dianggap sebagai masyarakat yang paling rentan (Boruff & Cutter, 2007;31), masyarakat rawan bencana di negara Berkembang (Huynh & Stringer, 2018; 171), terutama perempuan (Dimitrov, 2019;212). Persepsi muncul dari permasalahan pendapatan rendah, ketergantungannya terhadap sumber daya dan kerentanan iklim seperti kenaikan permukaan laut, curah hujan tinggi, abrasi, dan juga permasalahan non-iklim misalnya regulasi, marginalisasi, eksklusivitas, dan aksesibilitas sumber daya yang berkontribusi pada kerentanan mata pencaharian. Kondisi ini berimplikasi pada struktur kehidupan masyarakat suku Akit Studi tentang masyarakat suku Akit awalnya dimulai peneliti dari mengulas permasalahan *social capital* Suku Akit di Desa Berancah (Rosaliza, 2017, 2018, 2019), masyarakat yang paling rentan adalah perempuan Akit, rentan terhadap lahan sumber daya di kawasan tempat tinggal, program infrastruktur dan sosial ekonomi pemerintah yang belum responsif gender ditemukan di daerah ini.

Ketidaksetaraan gender menentukan aksesibilitas ke sumber daya lokal (Dimitrov, 2019). Dalam konteks masyarakat agraris, perbedaan gender menunjukkan kerentanan sosial. Ketika tekanan iklim meningkat, mengakses kayu bakar dan air, beradaptasi dengan pola tanam dan mengatasi konflik atas sumber daya alam yang tersedia menjadi sulit bagi perempuan (Jost & Naab, 2016;139). Kesehatan fisik perempuan sering memburuk yang diakibatkan oleh beban pekerjaan rumah tangga perempuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pria (Whyte, 2014; 601). Di Indonesia, masyarakat pesisir umumnya memiliki ketergantungan yang berlebihan

pada sumber daya alam, pergerakan yang terbatas, kepemilikan aset yang buruk (Malik, dkk., 2021), keterbatasan akses lahan, sumber daya ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan kerentanan mata pencaharian perempuan. Hal ini mempengaruhi pendapatan rumah tangga dan kegiatan ekonomi lainnya, mengganggu strategi dan hasil yang didapat dari mata pencaharian rumah tangga. Perempuan seringkali memiliki akses yang terbatas ke pasar dan berbagai macam bentuk program bantuan; dan juga tingkat melek huruf yang lebih rendah (Alam, dkk., 2015;67). Perempuan juga sering terlibat dalam fungsi ekologi (Pembibitan dan penanaman mangrove, Kampanye kebersihan lingkungan, perlindungan kawasan pantai dan wilayah pesisir) dan fungsi sosial, sangat jarang sekali terlibat dalam fungsi ekonomi hutan mangrove (Asriwandari, dkk., 2021; 60)

Ketahanan mata pencaharian adalah ketahanan ekologi (besarnya gangguan yang dapat ditoleransi oleh sistem masyarakat sebelum terjadinya suatu keadaan yang berbeda) (Gunderson & Holling, 2002; 74). Tinjauan literatur perubahan iklim memandang ketahanan sebagai kapasitas sistem sosio-ekologis, mempertahankan fungsi selama tekanan eksternal, dan beradaptasi, mengatur ulang, dan berkembang menjadi suatu hal yang lebih diinginkan keberlanjutannya, menjadikannya lebih siap menghadapi bahaya di masa depan (Boruff & Cutter, 2007; 31). *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) menyoroti keterkaitan antara konteks kerentanan, terdapat lima modal (manusia, fisik, keuangan, alam dan sosial), struktur dan proses, strategi mata pencaharian dan hasil yang akan didapatkan (Huynh & Stringer, 2018;176). kehidupan berkelanjutan yang dapat mengatasi dan pulih dari guncangan rumah tangga pada tingkat lokal (Scoones, 2009;187). Rumah tangga menjadi tangguh karena kapasitas untuk mengakses dan mempertahankan sumber mata pencaharian, hal ini mengakibatkan peningkatan untuk beradaptasi dengan kesulitan (Jost & Naab, 2016;137).

Berdasarkan penjelasan diatas, dirumuskan permasalahan: (1) Bagaimana kerentanan mata pencaharian perempuan pesisir di Bengkalis? (2) Apa pola adaptif, Pendidikan dan keterampilan perempuan sehubungan dengan infrastruktur di lingkungan tempat tinggal?.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di desa Berancah Provinsi Riau merupakan kawasan pesisir. Desa ini rentan terhadap bencana abrasi, gelombang pasang. Begitu minimnya penelitian gender di daerah Bengkalis, berdasarkan kerangka konseptual konseptualisasi yang responsif gender untuk adaptasi mata pencaharian terhadap kendala daerah pesisir (Gambar 1).

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Riset dilakukan dengan *fieldwork* dilakukan dalam tiga fase: pertama: fase survey lapangan yang dilakukan pada Juli 2022 mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dan juga melakukan pemetaan dan permasalahan. Kedua, *fieldwork* untuk mengumpulkan data yang dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2022, pada fase ini juga merekam refleksi masyarakat. Fase ketiga, Januari-Februari 2023, Kembali ke lapangan dan menyempurnakan data.

Sebanyak 6 orang informan kunci (2 orang Batin- Ketua adat Suku Akit, 3 Kepala Rumah tangga laki-laki sebagai pekerja panglong arang, kepala desa Berancah-Sungai Liong) dan 25 perempuan rentan diwawancara dengan kriteria (istri, janda dan status tingkat ketergantungan).

3. ANALISIS DATA

Kerentanan membutuhkan adaptasi, hal ini terjadi karena sumber mata pencaharian yang ada tidak memadai. Perempuan pesisir sangat kekurangan terhadap aset rumah tangga, secara negatif mempengaruhi kapasitas mereka untuk menyesuaikan diri dengan bahaya yang disebabkan oleh iklim dan buatan manusia. Karena memiliki lahan dan tempat tinggal rentan, tanpa jaminan kepemilikan, para perempuan ini tidak dapat menghasilkan sumber daya rumah tangga yang cukup untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan mereka.

Selain itu, pekerjaan sementara dan informal serta pendapatan yang mereka dapatkan, yang dipengaruhi oleh berbagai bentuk ketergantungan dan juga musim, menghasilkan status rentan dan sangat miskin. Tanpa akses bantuan dari pemerintah, pendidikan, pelatihan dan keterampilan, diversifikasi pekerjaan terbukti tidak mungkin, sementara kurangnya keanggotaan kelompok formal menghalangi mereka untuk mencari dukungan eksternal. Di luar rumah tangga, akses perempuan terhadap sumber daya alam dan fasilitas kesehatan juga sangat terbatas.

Perempuan yang tidak mendapat manfaat dari pekerjaan seringkali tidak memadai, barang-barang tingkat publik. Oleh karena itu, semua ini dinilai sangat miskin. Namun hal ini menunjukkan perlunya aset/sumber daya mata pencaharian yang berkelanjutan (Gallopini, 2006), diversifikasi mata pencaharian (Stifel, 2010) dan dukungan eksternal (Khalil, dkk., 2020) dalam meningkatkan kapasitas adaptif perempuan.

Adaptasi berdasarkan gender, sementara sosial dan ketimpangan spasial adalah suatu bentuk dukungan yang penting (Jerneck, 2018). Meskipun upaya global dan nasional terus menerus dalam mengurangi ketidaksetaraan gender (Haynes, 2017), kerentanan pesisir masih mengartikulasikan dimensi ketimpangan gender. Terlepas dari peran budaya patriarki yang begitu konservatif dan norma sosial yang berlaku dalam kontribusi rumah tangga dan kepemilikan/hak properti, masalah eksternal seperti kesenjangan pendapatan, kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, keamanan tempat kerja dan privasi menghasilkan ketidaksetaraan dan menambah penilaian yang buruk pada sektor ini. Juga, infrastruktur yang tepat akan mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Kualitas, kecukupan, aksesibilitas dan kondisi fisik masyarakat, pelayanan dan infrastruktur di pesisir sangat buruk.

Dengan kelangkaan fasilitas yang berfokus pada gender (misalnya perawatan kesehatan-dukungan puskesmas yang baik), infrastruktur kesehatan yang ada gagal menghasilkan efek samping yang diantisipasi pada mata pencaharian perempuan yang rentan, seperti yang terjadi mungkin di daerah lain. Dengan demikian, ketidaksetaraan tercipta tanpa perencanaan yang berfokus pada gender dan infrastruktur yang peka gender, yang akan menghambat adaptasi transformatif. Biaya perbaikan tahunan struktur rumah yang buruk dan kerusakan akibat bahaya iklim, semakin diperparah oleh kondisi infrastruktur pelayanan tingkat desa seperti tidak dapat diaksesnya, jalan rusak dan infrastruktur lainnya rusak.

Selain beberapa tempat tinggal yang telah disediakan oleh pemerintah, tidak ada ketersediaan infrastruktur masyarakat atau kesehatan yang memiliki fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat untuk beradaptasi. Sarana prasarana luar rumah tidak memadai dibandingkan

dengan kebutuhan yang sebenarnya. Sebagian besar infrastruktur tidak dirancang dan dibangun dengan benar untuk melayani tujuan bahaya dan non-bahaya. kurangnya kontekstualitas sehingga melemahkan tulang punggung perekonomian pesisir ini dan secara negatif mempengaruhi kapasitas adaptif perempuan marjinal terhadap bahaya saat ini dan masa depan.

Mengkonseptualisasikan infrastruktur yang tanggap gender sebagaimana disoroti di atas, konseptualisasi infrastruktur responsif gender yang terintegrasi dengan mata pencaharian untuk adaptasi perempuan pesisir terhadap berbagai kerentanan menjadi jelas tanpa adanya sumber mata pencaharian yang diperlukan (dalam skala pribadi dan komunitas). Kurangnya kepekaan gender, ketidakcukupan infrastruktur dan perencanaan/pelaksanaan infrastruktur yang sedikit demi sedikit semakin mempengaruhi hal ini. infrastruktur yang diusulkan pun harus dapat melayani dimensi sosial, psikologis, ekonomi, lingkungan dan fisik dari mata pencaharian perempuan pesisir yang rentan. Peran ganda perempuan pesisir (reproduktif, produktif dan manajerial) juga menuntut banyak waktu mereka yang berharga untuk mempertahankan penghidupan mereka.

Perencanaan infrastruktur sosial-fisik pedesaan yang tercerai-berai dan sedikit demi sedikit saat ini juga membutuhkan hubungan antar-sektor dan integrasi, meningkatkan aksesibilitas yang mudah para perempuan ini ke infrastruktur yang mereka butuhkan yang akan meningkatkan kemampuan adaptif mereka. Terutama mengingat kerentanan mata pencaharian unik perempuan di lingkungan pesisir, infrastruktur semacam itu dapat dibangun sebagai tempat perlindungan abrasi, pasang laut yang lebih baik, ditempatkan dalam jarak yang dapat diakses untuk mendukung kebutuhan mata pencaharian sehari-hari masyarakat (termasuk perempuan), dan dilengkapi dengan semua fasilitas yang kondusif gender dengan ruang yang ramah.

Perempuan rentan harus dilibatkan dalam desain fasilitas ini, manajemen konstruksi dan operasi untuk mengembangkan rasa memiliki. Perempuan juga dapat berbagi pengalaman mereka untuk mendorong pembelajaran bersama. Secara keseluruhan, fasilitas ini akan meningkatkan harga diri perempuan, memastikan privasi dan keamanan tempat kerja yang mereka butuhkan, membangun keanggotaan kelompok dan partisipasi aktif, serta menyediakan akses ke informasi. Fasilitas ini tidak akan mengisolasi perempuan dari masyarakat. Sebaliknya, ini akan peka sekali terhadap kebutuhan adaptasi sosial-budaya dan ekonomi khusus perempuan yang harus melakukan penyesuaian terhadap pembangunan dan transformasi. Fasilitas ini tidak akan mengisolasi perempuan dari masyarakat. Sebaliknya, ini akan peka terhadap kebutuhan adaptasi sosial-budaya-ekonomi khusus perempuan di luar penyesuaian terhadap pembangunan dan transformasi.

Fasilitas ini tidak akan mengisolasi perempuan dari masyarakat. Sebaliknya, ini akan peka terhadap kebutuhan adaptasi sosial-budaya-ekonomi khusus perempuan di luar penyesuaian terhadap pembangunan dan transformasi. Juga disadari bahwa infrastruktur saja tidak akan menyelesaikan kerentanan perempuan. Fasilitas integratif seperti itu, memiliki keduanya unsur keras (ruang-fisik) dan lembut (sosial-budaya-ekonomi), dapat memberdayakan dan meningkatkan kapasitas perempuan marginal dan rentan secara sosial-ekonomi dan, dalam prosesnya, meningkatkan ketahanan mata pencaharian mereka secara keseluruhan.

Dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana perempuan pesisir, semua intervensi infrastruktur harus disertai dengan berbagai tindakan lunak (seperti pendanaan/pembiayaan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan mata pencaharian). Upaya mandiri mungkin tidak membawa ketahanan yang diinginkan. Tabel 2 merangkum atribut, fungsi, dan kontribusi potensial kerangka kerja yang diusulkan ini.

Tabel 2. *Atribut, Fungsi dan Kontribusi Gender-responsif infrastruktur*

Gender Responsif Infrastruktur	Fungsi dalam Mata Pencaharian	Kontribusi untuk Mata pencaharian	
- Desain untuk ketahanan terhadap bencana	- Sebagai tempat berlindung yang aman	- Penyerapan	- Keamanan
- Pasar	- Kewirausahaan tentang produk yang diproduksi sendiri	- Adaptasi	- Mendapat penghasilan yang sesuai
- Tempat Kerja	- Upah yang sesuai		- Memiliki kestabilan sosial dan budaya
- Pengawasan Sosial			- Kemandirian
- Aksesibilitas yang mudah	- Sumber air minum yang memadai		
- Konstruksi yang dibuat ramah perempuan		- Transformasi	
- Tempat belajar	- Pengembangan keterampilan dan pengetahuan tentang produksi dan inovasi mata pencaharian		- Meningkatkan modal dan sumber daya manusia

Sumber: Penelitian, 2023

3.1. Infrastruktur Pesisir yang Rentan

Infrastruktur didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling bergantung dan bagian dari jaringan yang saling terkait (Turner, 2018). Memiliki komponen “keras” dan “lembut”. Komponen keras menandakan aset fisik yang memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan layanan kehidupan, sementara komponen lembut adalah mewujudkan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola/menyediakan fasilitas fisik yang baik.

Ketahanan infrastruktur adalah kemampuan infrastruktur (seperti rumah, jalan, jembatan) untuk beradaptasi dengan bencana dengan membatasi kerentanan atau meningkatkan kapasitas adaptif. Ketahanan infrastruktur diukur dengan tingkat ketahanan atau adaptasinya terhadap guncangan seperti perubahan iklim. Ketahanan adalah proses yang secara strategis ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak/guncangan perubahan iklim.

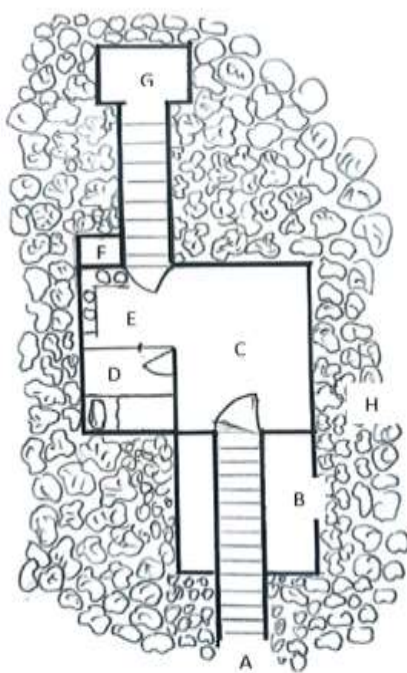
Infrastruktur juga merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi dan meningkatkan produktivitas dan sektor terkait lainnya di mana ekonomi pedesaan bergantung). Namun, di negara berkembang, pendanaan hampir tidak menjangkau masyarakat pedesaan di mana infrastruktur fisiknya sangat kurang.

Dalam konteks perubahan iklim, ketahanan infrastruktur bergantung pada karakteristik strukturalnya dan relevansi sosial-ekonomi. Strategi seperti suatu bentuk pengurangan, diversifikasi yang digunakan untuk mengurangi kerentanan infrastruktur pedesaan terkait perubahan iklim. Ini harus kontekstual dan sistematis dibingkai untuk mengatasi saling ketergantungan antara komponen yang berbeda dari sistem infrastruktur dan karenanya berfungsi secara integratif.

Dari hasil pengamatan rumah tangga perempuan dan keluarga yang tinggal di kawasan hutan mangrove (hutan Alam) sebagai "yang termiskin" yang ditandai dengan lokasi rumah

yang berada di kawasan hutan mangrove, ditambah lagi kondisi yang sangat rentan terhadap salinitas, abrasi, gelombang pasang dan curah hujan yang tinggi. Identifikasi ini berdasarkan status ekonomi, kondisi fisik mereka dianggap sebagai indikator utama kerentanan. Karena tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal, para perempuan dan keluarga ini tidak punya pilihan selain membangun rumah mereka di kawasan hutan mangrove (hutan alam).

Gambar 2. Layout Rumah Masyarakat Akit



Keterangan : Rumah masyarakat rentan yang hidup di pesisir yang berada di Kawasan hutan mangrove, rumah ini sangat sederhana sekali. Rumah ini berukuran 4.5 X 4 meter. Rumah ini merupakan rumah panggung yang terbuat dari papan, berada 1.5 meter diatas tanah hutan mangrove. Rumah ini beratap daun (rumbia) dan ada sebagian dari seng.

A. Jalan masuk rumah masyarakat Suku Akit yang berjarak lebih kurang 10 Meter dari fasilitas jalan masyarakat. Dihubungkan dengan titian setapak.

B. Pertama kali akan dijumpai tempat untuk menjemur baju dan ada bangku (kursi) yang terbuat dari kayu

C. Ruang pertama yang dijumpai di dalam rumah, terlihat ada tikar yang terbuat dari pandan dan karpet plastik

D. Ruang kamar yang hanya berukuran lebih kurang 2 X 1.5 meter. Ada Kasur tipis dan ada lemari kecil. Kamar ini ada pintu yang hanya ditutupi dengan kain.

E. Tempat masak dan mencuci piring, masyarakat ini masak dengan menggunakan kayu bakar dan tungku api.

F. Tempat cuci piring dan menyimpan air bersih (tangka air), menampung air hujan untuk persediaan minum.

G. Tempat Mandi cuci dan kakus (MCK), tempat ini agak jauh lebih kurang 10-13 meter dengan titian kayu, dibuat dari papan yang ditutupi seadanya.

H. Disekeliling rumah terdapat pohon mangrove yang lumayan rapat dan terdapat anakan pohon mangrove. Lokasi ini akan tergenang air laut Ketika air pasang laut naik ke darat.

Sumber: Penelitian Lapangan, 2023

Lahan pemukiman masyarakat desa Berancah adalah milik hutan lindung yang dikendalikan oleh Departemen Kehutanan yang terletak di sepanjang garis pantai utara Bengkulu. Karena adanya larangan dari kewajiban undang-undang, bahkan yang paling rentan pun tidak diizinkan untuk memanfaatkan sumber daya mangrove. Meskipun beberapa laki-laki secara ilegal menebang pohon mangrove, para perempuan jarang terlibat.

Rumah Suku Akit tempat mereka tinggal merupakan rumah panggung dibuat dengan tujuan jika air laut pasang tidak sampai naik ke rumah. Rumah mereka pada umumnya terbuat dari material yang ramah lingkungan yaitu tiang-tiang penopang rumah terbuat dari kayu keras sementara dinding dan lantai terbuat dari papan, untuk material penutup atap rumah terbuat dari daun rumbia. Penataan ruangan rumah lebih sederhana, jumlah kamar tidur dan pembagian-pembagian ruangan juga belum tertata, seperti ruang tamu dan ruang keluarga masih menyatu dengan ruang makan. Kondisi dinding dan lantai rumah Suku Akit banyak yang berlubang karena proses pemasangan yang kurang rapat dan juga disebabkan belum dilakukan penggantian pada bagian dari papan yang lapuk, hal ini menyebabkan kondisi lantai sulit untuk dibersihkan dan suhu rumah di malam hari lebih sejuk dan menjadi akses masuknya nyamuk, lalat, tikus dan binatang lainnya. Budaya turun temurun mendirikan rumah panggung

mengikuti sejarah rumah nenek moyang mereka yang dulunya membangun rumah lebih tinggi dari tanah sebagai bentuk upaya pencegahan naiknya air laut dan agar terhindar dari gangguan binatang buas atau berbisa. Lantai rumah Suku Akit terbuat dari papan yang diambil dari kayu pilihan sesuai dengan ketahanan sebagai alas dan penahan beban dari isi rumah. Tata cara penyusunan papan untuk lantai sama dengan rumah pada umumnya, namun kondisi papan lantai yang sudah lapuk dan belum dilakukan penggantian sehingga ada banyak lantai yang berlubang sehingga pada malam hari terasa lebih sejuk dan jalan masuk nyamuk dan binatang lainnya lebih banyak.

Lain halnya dengan ketersediaan air, Kebutuhan akan air bersih untuk kegiatan dalam kesehariannya seperti kegiatan MCK (mandi, cuci, kakus) mereka pada umumnya menggunakan air hujan dan air tanah/sumur gali. Air tanah diperoleh dengan cara membuat sumur galian (perigi) di sekitar lingkungan tempat tinggal. Air tanah dan air tanah biasanya digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan mandi, mencuci dan memasak. Kondisi air sumur galian berwarna kekuningan, berbau lumpur dan rasanya payau.

Ketersediaan air hujan juga tergantung pada musim hujan atau kemarau, bila musim kemarau tiba maka air sumur galian menjadi satu-satunya sumber air bersih dan air minum. Pada umumnya hanya sedikit di lahan pemukiman mereka yang memiliki perigi disebabkan oleh penggunaan satu perigi secara bersama-sama. Teknik pembuatan sumur gali Suku Akit ini sangat sederhana, hanya berupa galian tanah dengan kedalaman ± 2 m sampai dengan ± 3 m tanpa menggunakan cincin beton yang berfungsi sebagai penahan tanah.

Air hujan merupakan alternatif lain untuk mendapatkan sumber air minum. Setiap saluran buangan air dari atap rumah ditata sedemikian rupa sehingga dapat menyalurkan air hujan ke tangki-tangki penampungan (yang mereka sebut- Pah-). Pada ujung drum atau tangki ditutup dengan kain kasa sebagai penyaring, agar sampah tidak ikut terbawa masuk ke drum. Setiap rumah Suku Akit mempunyai tempat penampungan air hujan, hanya teknik dan cara penampungannya saja yang berbeda-beda. Teknik sederhana yang dilakukan Suku Akit dalam menyalurkan air hujan ke setiap tangki penampungan termasuk merupakan cara sederhana.

3.2. Kondisi Mata Pencaharian Perempuan Pesisir

Pada awal 1990-an, pendekatan mata pencaharian berkelanjutan (*Sustainable Livelihood Approach*) (DFID, 1999) atau lebih dikenal dengan sebutan kerangka mata pencaharian berkelanjutan (*Sustainable Livelihood Framework*) (UNDP, 2017) – telah menjadi kerangka kerja akademis dan terapan, terutama di daerah pedesaan di negara berkembang. Kerangka ini ditetapkan sebagai pendekatan. Standar DFID, mengidentifikasi lima jenis aset yang dapat dimanfaatkan oleh manusia manusia seperti diuraikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Lima Aset Mata Pencaharian

Aset/ Modal	Keterangan
Manusia	Meliputi keterampilan, pengetahuan, kesehatan yang baik dan kemampuan untuk bekerja sama yang memungkinkan mengejar hal-hal yang berbeda dalam hal strategi kehidupan untuk mencapai tujuan hidup mereka.
Sosial	Sumber daya sosial yang dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk hubungan informal kepercayaan, timbal balik dan pertukaran dengan keluarga, teman dan tetangga serta pengelompokan yang lebih formal (misalnya komunitas dan kelompok agama)
Fisik	Alat dan perlengkapan (alat terbang, sampan dan lain-lain) yang dibutuhkan disertai dengan infrastruktur yang diperlukan untuk berfungsi, misalnya, transportasi dan energi yang terjangkau, rumah yang layak dan akses informasi
Keuangan	Pendapatan yang diperoleh, tabungan, fasilitas, pemeliharaan anak dan lain-lain.

Alam	Tanah, cuaca dan tanaman yang dapat diandalkan untuk menghasilkan makanan dan memperoleh penghasilan.
-------------	---

Sumber: Diadaptasi dari DFID (1999).

Mata pencaharian sebagai sebuah pendekatan digunakan secara luas dan seringkali dengan cara yang cukup dekat dengan formulasi aslinya. Pendekatan mata pencaharian sekarang ini banyak diterapkan secara harfiah pada semua hal. Namun bisa dikatakan, pendekatan dan fokusnya pada kehidupan desa dan kemampuan individu membuatnya seperti suatu proses pergeseran yang terjadi dalam mata pencaharian pedesaan selama beberapa tahun terakhir (Scoones, 2015).

Pendekatan Mata Pencaharian berguna dalam penelitian ini. Pertama, sebagai lensa yang digunakan untuk menyelidiki integrasi adaptasi perempuan terhadap perubahan iklim, pembangunan dan praktik mata pencaharian di tingkat lokal. Ketika seseorang membuat keputusan untuk melakukan aktivitas mata pencaharian tertentu, mereka akan dihadapkan dengan berbagai kekuatan selain variabilitas iklim. Kedua, sebagai kerangka kerja pengorganisasian yang berguna untuk fokus pada gender dan adaptasi perubahan iklim, dalam hal ini kapasitas adaptif perempuan pesisir Sebagian besar dipengaruhi oleh hak yang perempuan miliki atas modal alam, sosial-politik dan manusia. Hutan mangrove sebagai aset utama bagi mata pencaharian perempuan pesisir di desa Berancah.

Mata pencaharian dan pilihan pendapatan perempuan pesisir lebih sedikit diversifikasi di desa Berancah; hanya tiga sumber pekerjaan utama yang ditemukan di desa ini adalah Pengambil mangrove untuk kayu Bakau sebagai bahan baku pembuat arang, membuat atap nipah, menjual potongan kayu untuk keperluan kayu bakar. Namun, semua pekerjaan ini bersifat musiman dan waktu pemilihan berdasarkan pada pasokan panglong arang Ketika akan diproduksi (6 kali selama setahun), karena mereka terus mencari pekerjaan kecil untuk bertahan hidup selama waktu paceklik yang tersisa.

Gambar 3. Kondisi Tempat Tinggal Perempuan Akit



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2023

Perempuan pesisir tidak berhasil menemukan pekerjaan seperti laki-laki karena keterbatasan keterampilan yang mereka miliki. Dari hasil wawancara, biasanya, para perempuan (janda) sebagai pencari nafkah untuk 3-5 tanggungan keluarga. Pendapatan rumah tangga rata-rata mereka adalah Rp 800.000,00/bulan selama 6 bulan masa produksi kayu arang dan hampir nol selama 6 bulan Ketika dapur arang tidak dibongkar.

Untuk berhemat sangat tidak mungkin dilakukan dengan pekerjaan informal, musiman, dan sementara. Oleh karena itu, meminjam dari tauke (China-patronase) adalah satu-satunya pilihan untuk menangani kesulitan keuangan dalam berbagai peristiwa seperti terserang penyakit, pernikahan anak ataupun ketika musim masuk sekolah untuk membeli keperluan anak sekolah.

3.3. Pendidikan dan Keterampilan Perempuan Pesisir

Berdasarkan keterangan dari informan, keluarga perempuan pesisir biasanya melakukan pernikahan dini pada usia 12-16 tahun. Hanya sedikit sekali dari mereka yang menerima pelatihan pengembangan keterampilan dari departemen pemerintah (misalnya pertanian atau urusan sosial) atau LSM hubungan LSM-perempuan tidak dapat disebut murni sosial (lebih bersifat patron-klien). Sebaliknya, satu-satunya hubungan sosial yang mereka pertahankan adalah dengan kerabat dan tetangga mereka, di mana yang terakhir, meskipun miskin, yang akan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sosial dan keuangan.

Para laki-laki (suami), menghasilkan uang dengan cara bekerja mencari kayu bakau dan kuli panglong; pada saat yang sama, yang perempuan lakukan adalah memasak, menjaga anak-anak dan menikmati waktu luang. Hal ini tentu saja menimbulkan persepsi bahwa laki-laki menggambarkan norma patriarki yang bertahan sudah sejak lama, di mana laki-laki diyakini berkontribusi dengan “pekerjaan yang nyata”, sedangkan perempuan dipandang sebagai pihak yang hanya menikmati hasil dari apa yang laki-laki hasilkan dengan kata lain yang menikmati kenyamanan rumah. Sebuah kontra argumen, para suami pergi kerja ke dalam hutan. Laki-laki dianggap yang paling peduli dengan anak-anak, orang tua, dan aset fisik. Ketika laki-laki tidak ada atau tidak bisa bekerja lagi, perempuan akan menjadi pencari nafkah penuh. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang sangat terbatas, dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk memastikan keluarga mereka bisa makan dua kali sehari.

Karena budaya konservatif, perempuan memilih untuk bekerja di dalam rumah mereka dan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan tingkat wisma seperti peternakan, menjahit, menenun dengan tangan, membuat acar dan membuat hiasan kerang. Hal ini meningkatkan produktivitas rumah tangga, tetapi mereka menjadi absen dari sektor-sektor yang didominasi laki-laki seperti perikanan laut dalam, perikanan, pekerjaan buruh harian, dan pertanian. Karena penolakan sosial budaya, dominasi laki-laki dan masalah keselamatan dan keamanan, para perempuan ini tidak dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan yang menghasilkan pendapatan dengan menggunakan potensi penuh mereka.

Nilai-nilai agama-budaya dan kebutuhan akan tingkat privasi tertentu mempengaruhi pemilihan tempat kerja mereka, misalnya mereka memilih bekerja di ruang terbuka atau membawa anak, saudara atau teman ke tempat kerja. Selain itu, sesuai dengan pengakuan mereka, bahwa mereka menghadapi pelecehan mental atau fisik saat berjalan ke tempat kerja jarak jauh dari rumah, karena hal ini dapat mengekspos mereka pada pelecehan fisik dan psikologis oleh laki-laki. Pengambilan kayu mangrove diidentifikasi sebagai yang paling berbahaya di antara semua tempat kerja di luar rumah. Untuk rumah tangga marjinal, sumber pendapatan tunggal tidak akan cukup untuk membiayai hidup subsisten apalagi bulanan.

4. KESIMPULAN

Pada platform infrastruktur, terlepas dari bahaya yang akan terjadi, harus menjadi tempat untuk pengembangan keterampilan dan kapasitas serta dukungan/jaringan internal/eksternal.

Dengan demikian, dana sedikit demi sedikit untuk layanan sosial bisa lebih efektif jika dikoordinasikan dan dialokasikan untuk infrastruktur yang sesuai. Dengan akses ke fasilitas masyarakat pesisir yang layak, seperti dalam infrastruktur multiguna peka gender, masyarakat akan lebih berdaya untuk mengatur diri sendiri dan saling mendukung dalam memberikan manfaat. Studi kasus ini menyarankan bahwa pendanaan/intervensi untuk layanan sosial akan lebih efektif jika dikoordinasikan dan dialokasikan ke infrastruktur yang sesuai.

Begitu juga dengan Penggunaan SLF sebagai panduan untuk perumusan kebijakan lokal, nasional dan regional mengenai komunitas masyarakat pesisir dalam mengatasi berbagai permasalahan mata pencaharian dan infrastruktur. SLF dapat memberikan gambaran tentang kerentanan perempuan terhadap guncangan, strategi penanggulangan mata pencaharian dan implikasi undang-undang serta kebijakan terhadap aspek kerentanan hidup perempuan pesisir. Studi lanjut diperlukan untuk dapat berkontribusi pada pemahaman tentang pengelolaan mata pencaharian perempuan di kawasan pesisir, yang berkaitan dengan pemangku kepentingan yang tepat dan regulasi pemanfaatan hutan mangrove daerah pesisir karena berimplikasi pada mata pencaharian perempuan yang berkelanjutan.

Peningkatan pengetahuan lokal tentang kerentanan dan adaptasi sangat dibutuhkan, oleh karena itu, lebih banyak studi harus dilakukan untuk memprediksi garis trend risiko terkait iklim di tingkat mikro dan kompleksitas dan tantangan adaptasi tingkat lokal dalam konteks yang berbeda untuk memandu kebijakan dan upaya manajemen untuk membangun ketahanan yang terkena dampak dengan sebaik-baiknya rumah tangga dan masyarakat, serta ekosistem alam dalam hal ini hutan mangrove.

Pengakuan

Penelitian ini merupakan bagian dari tesis doctoral penulis utama. Terima kasih disampaikan kepada promotor, Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri dan Dr. Ricardi S. Adnan selaku kopromotor yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis. Terima kasih juga kepada pihak sponsor dana, Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

REFERENSI

- Alam, Mayesha., Rukmani, Bhatia. dan Briana Mawby. 2015. *Impact and Agency in Human Rights, Security, and Economic Development*. Georgetown; Georgetown Institute for Women, Peace and Security.
- Asriwandari, Hesti, dkk. 2021. *Women and the Future of Mangrove in Meranti Island, Riau*. (Journal International Journal of Agriculture Science, Vol. 5 Edisi II).
- Boruff, Brian dan Susan L Cutter. 2007. *The Environmental Vulnerability of Caribbean Island Nations*. (Jurnal Geographical Review, Vol. 97, Edisi I).
- DFID, 1999. *Key Sheets for Sustainable Development: Overview*. Edisi I. London; Department for International Development.
- Dimitrov, Bogdan. 2019. *Effects of Climate change on Women*. Research Review International (Journal of Multidisciplinary, Vol. 04, Edisi V).
- Gallopin, Gilberto C. 2006. *Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity*. (Journal Global Environmental Change Vol 16 Edisi III).
- Gunderson, Lance H. dan Crawford Holling. 2002. *Resilience and Adaptive cycles, Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural System*. Washington; Island Press.

- Haynes, Alex. 2017. *Everyday in Rural: Understanding Gender Relations in the Context of Climate Change*. (Journal Understanding Climate change through Gender Relations, Vol. 4 Edisi 1).
- Huynh, Lam. dan, Lindsay Stringer. 2018. *Multi-scale Assessment of Social Vulnerability to Climate Change: An Empirical Study in Coastal Vietnam*. (Journal Climate Risk Management Vol. I Edisi XX).
- Jerneck, Anne. 2018. *What about Gender in Climate Change? Twelve feminist lessons from development*. (Journal Sustainability Vol 3 Edisi X).
- Jost, Chistin dan Jesse Naab. 2016. *Understanding gender dimensions of Agriculture and climate change in smallholder farming communities*. (Journal Climate and Development Vol. 8 Edisi I).
- Khalil, Momtaj., Jacobs, Brent. dan Natasa Kuruppu. 2020. *Female Contribution to Grassroots Innovation for Climate Change Adaptation in Bangladesh*. (Journal Economics climate and development, Vol. 12 Edisi 7).
- Malik, Ihyani., Rusnaedy, Zaldy. dan, Nur Khaerah. 2021. *Coastal Women's Resilience Strategy against Climate Change Vulnerability in Makassar, Indonesia*. Makasar, E3S Web of Conferences.
- Rosaliza, Mita., 2017. *Komunitas Suku Akit (Studi Kapital Sosial Masyarakat Suku Akit Pesisir Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. (Jurnal Ilmu Budaya, Vol, 12 Edisi II).
- Rosaliza, Mita., 2018. *Akit Tribe and Existence of Mangrove Forest*. Makasar, IOPScience.
- Rosaliza, Mita., 2018. *Local Knowledge Suku Akit Bengkalis*. (Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 14 Edisi I).
- Rosaliza, Mita., 2019. *Etos Kerja Suku Akit dalam Hubungan Patronase di Desa Berancah Kabupaten Bengkalis*. Pekanbaru; LPPM Universitas Riau.
- Scoones, Ian. 2009. *Livelihood Perspectives and rural development*. (Journal Peasant Studies, Vol 36 Edisi I).
- Scoones, Ian. 2015. *Sustainable Livelihoods and Rural Development*. Rugby, UK; Practical Action Publishing.
- Stifel, David. 2010. *The Rural Non-Farm Economy, Livelihood Strategies and Household Welfare*. (Journal African Journal of Agriculture and Resource Economics, Vol. 28 Edisi I).
- Turner, Collin. 2018. *Regional Infrastructure Systems: The Political Economy of Regional Infrastructure*. Edisi I. UK; Edward Elgar Publishing.
- UNDP, 2017. *Guidance note: Application of the sustainable livelihoods framework in development project*. Edisi I. Panama City; United Nations Development Programme.
- Whyte, Kyle Powys. 2014. *Indigenous Women, Climate Change Impacts and Collective Action*. (Journal Feminist Philosophy, Vol. 39 Edisi III).